



BPK Dorong Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM

PONTIANAK-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, menggelar 'Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Jumat (29/3).

Kegiatan ini juga sekaligus dilakukan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dari Pemda kepada BPK di Kalbar. Berbagai instansi pemerintah dalam kegiatan ini.

"Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang pimpinan dan jajarannya dan berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata BPK Kalbar, Joko Agus Setyono.

Sebelumnya kata Joko, BPK Kalbar telah melaksanakan Pencanaan ZI, dengan melalui rangkaian proses reformasi birokrasi. Dalam hal ini BPK berupaya dengan melakukan langkah-langkah inovatif dalam pelayanan publik.

"Salah satunya dengan database entitas pemeriksaan, penyediaan informasi publik yang lebih mudah diakses oleh stakeholders," sebutnya.

Joko menjelaskan, dalam pembangunan ZI merupakan tahap setelah Pencanaan, penguatan pembangunan ZI yang dilaksanakan merupakan suatu pernyataan komitmen kembali bagi BPK Kalbar bahwa keberhasilan pembangunan ZI sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing individu.

"Tentunya yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya," jelasnya.

Memfaatkan momen penguatan ini, seluruh Pemda juga menyerahkan laporan keuangan Unaudited kepada BPK. Dengan tersampainya seluruh laporan keuangan unaudited akhir yakni tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, Pemda telah mewujudkan amanat Undang-Undang.

"Tertibnya penyerahan LK Unaudited ini juga dapat membantu BPK dalam membuat perencanaan pemeriksaan karena sesuai dengan jadwal. Penyerahan LK Unaudited ini BPK Kalbar juga dapat secara serempak melaksanakan pemeriksaan yang dimulai pada Kamis, 4 April 2019 pada 15 entitas provinsi, kabupaten dan kota," tutupnya. (ova)



PENYERAHAN. Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited, oleh Kepala BPK Kalbar, Joko Agus Setyono kepada Bupati Sintang, Jarot Winarno, Jumat (29/3). *Nova Sari-RK*